

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

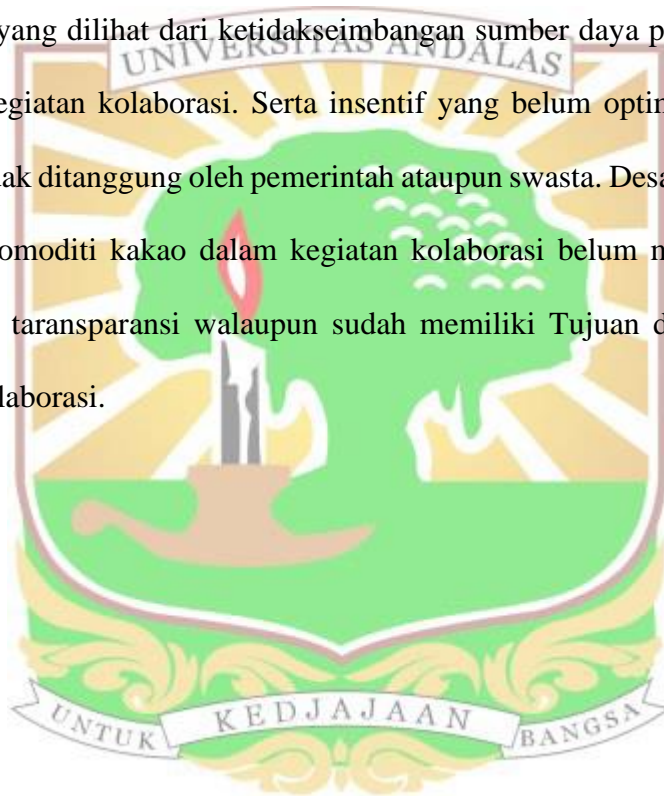
6.1 Kesimpulan

Kolaborasi dalam pengelolaan komoditi kakao merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan dorongan dari PT PAII (Pengelola Aset Islami Indonesia) dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan hasil produksi perkebunan. Kegiatan ini bertujuan dalam pembinaan dan jaminan pemasaran biji kakao yang berkualitas fermentasi oleh petani kakao.

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kolaborasi pengelolaan komoditi Kakao di Nagari Salayo Kabupaten Solok maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kolaborasi pengelolaan komoditi kakao Nagari Salayo berdasarkan teori Ansel dan Gash sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kepemimpinan dalam pelaksanaan kolaborasi yang telah dilakukan dengan adanya penetapan kebijakan dapat dilihat dalam bentuk nota dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan PT PAII dalam menjamin pasar petani kakao. Dalam pembuatan kebijakan, pemimpin melibatkan kelompok tani, PT PAII dalam pengambilan keputusan. Hal lain pemimpin memfasilitasi dialog dengan cara melaksanakan pertemuan antara aktor yang membahas kegiatan kolaborasi seperti rancangan kegiatan pengembangan Kakao di Nagari Salayo Kabupaten Solok. PT PAII juga memfasilitasi dialog melalui pembinaan langsung kepada kelompok tani. Tentunya dalam proses kolaborasi ini semua aktor mengeksplorasi keuntungan secara bersama sehingga mereka berbagi peran dalam kolaborasi.

Proses kolaborasi dalam pengelolaan komoditi kakao di Nagari Salayo Kabupaten Solok sudah berjalan dengan baik. Dalam proses kolaborasi hal yang sangat penting yaitu membangun komitmen petani untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Kakao fermentasi. Sehingga hasil dari proses itu sangat berdampak baik oleh petani yang melakukan fermentasi.

Namun pada pelaksanaanya masih terdapat beberapa kendala yaitu pada Kondisi awal yang dilihat dari ketidakseimbangan sumber daya petani yang tidak mendukung kegiatan kolaborasi. Serta insentif yang belum optimal seperti upah petani yang tidak ditanggung oleh pemerintah ataupun swasta. Desain kelembagaan pengelolaan komoditi kakao dalam kegiatan kolaborasi belum maksimal karena belum adanya taransparansi walaupun sudah memiliki Tujuan dan aturan dasar pendukung kolaborasi.



6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait Collaborative Governance dalam pengelolaan komoditi kakao di Nagari Salayo Kabupaten Solok;

1. Sebaiknya pada kondisi awal, pemerintah dan aktor yang terlibat harus lebih berkomitmen dalam menjalankan kolaborasi. Hal ini agar terjalannya praktek kolaborasi yang baik dan juga tidak ada aktor yang disalahkan atau dirugikan. Sehingga hasil yang didapatkan baik kalau berkomitmen.
2. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Solok mengawasi jalannya kegiatan secara penuh agar kegiatan tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Solok dan juga aktor yang terlibat lebih intens lagi untuk melakukan komunikasi agar tidak terjadi miss komunikasi antara Dinas Pertanian dan PT PAII dan juga kelompok tani.
4. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Solok menjadwalkan pertemuan secara berkala dengan kelompok tani agar mereka lebih mengerti dengan kegiatan yang telah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Solok tersebut.
5. Untuk Petani agar mempertahankan biji kakao yang fermentasi dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang didapat selama kolaborasi, sehingga dampak yang dirasakan tidak hanya selama kolaborasi berlangsung tetapi bersifat jangka panjang.

6. Dalam kegiatan ini pemerintah nagari seperti Bamus melakukan pengewasan kepada masyarakat.



